

# Diplomasi Belanda dan Indonesia dalam Sengketa Irian Barat, 1949-1950: Sebuah Kajian Historis

Oleh:  
Siswanto

## Abstract

*This article would like to understand the history of diplomacy of Dutch and Indonesia in West Papua dispute in 1949 to 1950. According to historical documents, West Papua dispute has begun since Round Table Conference in 1949. In that Conference, the delegation of Dutch and Indonesian agreed to renegotiate West Papua problem one year after the Conference. In April 1950, Dutch and Indonesia negotiated the problem in Jakarta, but both countries could not produce a significant commitment. In December 1950 Dutch and Indonesia held a Special Conference in Hague in order to solve the problem, but once again they are failed. The peace proposal which is introduced by both countries is so contradicted one another. At last, West Papua dispute could not be negotiated successfully because Dutch did not have serious intention to transfer West Papua to Indonesia.*

Sengketa Irian Barat tidak terlepas dari Konferensi Meja Bundar tahun (KMB) 1949. Bahkan, KMB dipandang sebagai sumber munculnya sengketa Irian Barat. Delegasi Belanda tidak menuntaskan pelimpahan kedaulatan kepada RIS, sebaliknya menunda persoalan eksistensi Irian Barat. Kesepakatan penundaan soal Irian Barat ini juga tidak berhasil mengantar Belanda dan Indonesia menyelesaikan persoalan tersebut. Setahun setelah KMB kedua belah pihak memang merundingkan masalah tersebut. Walaupun sudah merundingkannya, mereka tetap gagal mencapai kata sepakat. Dengan demikian, KMB telah mewariskan “bom waktu” yang menyusahkan Indonesia dikemudian hari.

Dalam sidang komite Perserikatan Bangsa-Bangsa 23 November 1954 Belanda dan Indonesia sama-sama ingin mengontrol Irian Barat. Oleh karena itu, sengketa Irian Barat adalah konflik kedaulatan antara Belanda dan Indonesia. Di satu sisi Belanda menyatakan peduli kepada penduduk Irian Barat dan akan memberikan hak menentukan nasib sendiri

dikemudian hari, sedangkan di sisi lain Indonesia memandang bahwa Irian Barat sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari Indonesia.<sup>1</sup> Belanda dan Indonesia sama-sama memperjuangkan kepentingan nasionalnya.

Dengan demikian, sengketa Irian Barat yang berkepanjangan disebabkan oleh adanya kenyataan bahwa di satu pihak Belanda ingin mempertahankan kekuasaannya di Irian Barat, sedangkan pada waktu yang bersamaan Indonesia menghendaki Belanda meninggalkan wilayah tersebut.

## KMB dan Irian Barat

Salah satu peristiwa penting dalam sejarah diplomasi Indonesia adalah KMB yang diselenggarakan pada 23 Agustus sampai dengan 2 November 1949 di Den Haag. Delegasi Indonesia dalam KMB dipimpin oleh

---

<sup>1</sup> Robert C. Bone, Jr. *The Dynamic of the Western New Guinea (Irian Barat) Problem*, Modern Indonesian Project, (New York: Department of Far Eastern Studies, Cornell University, 1958), 128

Dr. Mohammad Hatta, delegasi Bijenkooomst Voor Federal Overleg (BFO) atau negara-negara “boneka” buatan Belanda di Indonesia Tengah dan Timur dipimpin oleh Sultan Hamid, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh Van Maarseveen. Anggota Komisi PBB untuk Indonesia yang juga turut serta dalam KMB adalah Herremans, Merle, Cohran, Crichtley, dan Ramos.<sup>2</sup> Susunan lengkap delegasi Republik Indonesia pada KMB meliputi: Ketua Dr. Mohammad Hatta, Wakil Mohammad Roem, dan anggota terdiri atas: Dr. Sukiman Wirjosandjojo, Dr. J. Leimena, Mr. Ali Sastroamidjojo, Mr. Sujono Hadinoto, Kolonel T.B. Simatupang, Ir. Juanda, Prof. Dr. Mr. Supomo, dan R. Margono Djohadikusumo.

KMB di samping menetapkan soal penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada RIS juga mengatur soal Irian Barat. Sejarah menunjukkan KMB tidak bisa menjadi rujukan yang baik bagi penyelesaian soal Irian Barat. Hal ini asumsinya disebabkan dokumen KMB tidak mengatur secara rinci status politik Irian Barat.

Landasan yuridis penundaan penyerahan Irian Barat oleh Belanda kepada Indonesia tertuang pada pasal 2, dokumen KMB. Dokumen ini menyatakan karena belum ada kesepakatan, keterbatasan waktu, dan demi hubungan baik, maka Irian Barat ditetapkan dalam keadaan status quo selama satu tahun.<sup>3</sup> Ini artinya Belanda tetap berkuasa di wilayah tersebut setidaknya selama setahun sejak KMB, sedangkan Indonesia harus bersabar menunggu saat perundingan sesuai dengan kesepakatan KMB. Dokumen selengkapnya sebagai berikut:

- a. disebabkan kenyataan bahwa persesuaian antara pendirian masing2 pihak tentang Irian barat belum dapat ditjapai, sehingga soal itu masih mendjadi pokok pertikaian;

- b. disebabkan keharusan Konperensi Medja Bundar diachiri dengan berhasil pada tanggal 2 November 1949.
- c. mengingat faktor2 penting jang harus diperhatika pada pemetjahan masalah Irian itu;
- d. mengingat singkatnja penjelidikan jang telah dapat diadakan dan diselesaikan perihal soal2 jang bersangkutan dengan masalah Irian itu;
- e. mengingat sukarnja tugas kewadajiban jang akan dihadapi dengan segera oleh pesereta Uni, dan
- f. mengingat kebulatan hati pihak2 jang bersangkutan hendak memper-tahankan azas supaya semua perselisihan jang mungkin ternjata kelak akan timbul, diselesaikan dengan jalan patut dan rukun, maka status quo keresidenan Irian (New Guinea) tetap berlaku serta ditemukan, bahwa dalam waktu setahun sesudah tanggal penjerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat masalah kedudukan-kenegaraan Irian akan diselesaikan dengan djalan perundingan antara Republik Indonesia Serikat dan Keradjaan Netherland.<sup>4</sup>

Kendala waktu menjadi alasan formal penundaan penyelesaian sengketa Irian Barat. KMB berlangsung selama 96 hari, tetapi tidak menuntas posisi Irian Barat. Hal ini sebagai indikasi bahwa KMB diwarnai oleh diskusi, perdebatan, dan upaya kompromi yang memakan waktu. Artinya kedua delegasi memiliki perbedaan-perbedaan prinsip khususnya yang terkait dengan soal status Irian Barat. Kedua delegasi sama-sama membawa aspirasi negaranya sehingga setiap persoalan dibicarakan dengan seksama dan didasarkan perhitungan rinci dari segi kepentingan

---

<sup>2</sup> Panitia 75 Tahun Kasman, *Hidup Adalah Perjuangan : Kasman Singodimedjo 75 tahun*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1982). Hlm. 169

<sup>3</sup> Dua Puluh Lima Tahun Departemen Luar Negeri 1945-1970, (Jakarta: Deparlu, 1970) hlm. 87

---

<sup>4</sup> Deparlu. *Ibid.*

nasionalnya masing-masing. Oleh karenanya, perundingan berlangsung relatif lama. Sehingga pemikiran yang berkembang pada masa itu ialah pembahasan masalah Irian Barat memerlukan waktu yang khusus.

Namun demikian alasan politik dibalik penundaan soal Irian Barat ini juga perlu dipahami. Keputusan penundaan ini tidak terlepas dari strategi Belanda yang ingin bertahan di Irian Barat. Belanda mengharapkan Indonesia kacau dan berpeluang kembali (ke Indonesia) melalui Irian Barat.<sup>5</sup> Ini terbukti Belanda kurang berminat merundingkan soal kedaulatan Irian Barat, tetapi Belanda bersedia berunding soal perburuan dan transportasi antara Irian Barat dan Indonesia.<sup>6</sup> Jadi, Belanda lebih bersedia mendiskusikan hal-hal yang bersifat teknis. Pelimpahan kedaulatan melalui KMB adalah sesuatu yang tidak sungguh-sungguh diinginkan oleh Belanda, tetapi lebih disebabkan Belanda mendapat tekanan internasional. Misalnya saja resolusi Dewan Keamanan tanggal 28 Januari 1949, yang menyatakan; 1). Penghentian operasi militer Belanda, 2). Pemimpin-pemimpin Republik Indonesia harus dikembalikan ke Yogyakarta, 3). Pengakuan kedaulatan atas Negara Indonesia Serikat.<sup>7</sup> Butir terakhir ini menjadi faktor pendorong Belanda ke meja perundingan (KMB).

Pada waktu yang bersamaan, Indonesia bersikap moderat dalam perundingan KMB. Sikap politik Indonesia dipengaruhi oleh haluan politik pimpinan delegasinya. Delegasi Indonesia pada KMB dipimpin oleh oleh Mohammad Hatta. Hatta berhaluan politik lebih moderat terhadap Belanda dibandingkan Mohamad Natsir atau Sukarno. Bahkan Hatta meyakini supaya penyelesaian sengketa Irian Barat berhasil, Indonesia sebaiknya memberi konsesi

kepada Belanda. Di samping itu, delegasi Indonesia bersikap realistis terhadap posisi politiknya pada waktu itu. Posisi tawar (*bargaining position*) Indonesia tidak cukup kuat menghadapi Belanda. Indonesia adalah negara yang belum lama lepas dari belenggu penjajah dan Belanda adalah negara bekas penjajahnya. Sikap kompromi dipandang oleh delegasi Indonesia sebagai sikap terbaik saat masa itu. Di samping itu, sikap moderat juga dipengaruhi oleh kegembiraan delegasi Indonesia karena mendapat pengakuan dari Belanda. Indonesia memang sudah merdeka sejak tahun 1945, tetapi pihak Belanda tidak mengakuinya. Jadi, *de facto* Indonesia memang sudah merdeka, namun *de jure* kemerdekaan Indonesia masih bermasalah.

Penundaan penyelesaian sengketa Irian Barat menguntungkan posisi politik Belanda. Seperti disebutkan di bagian terdahulu dokumen KMB memberi hak kepada Belanda untuk tetap mengontrol Irian Barat selama setahun. Artinya *de facto* Belanda masih berkuasa di Irian Barat. Belanda memiliki waktu satu tahun untuk mengatur strategi agar bertahan di Irian Barat. Belanda menunda persoalan Irian Barat. Dalam masyarakat Belanda ada keyakinan bahwa menunda berarti membatalkan. Dengan demikian, penundaan soal Irian Barat dalam perspektif Belanda bisa diartikan sebagai pembatalan tuntutan Indonesia atas Irian Barat atau peluang mempertahankan eksistensinya di Irian Barat.

Sebaliknya penundaan masalah Irian Barat dipandang merugikan posisi politik Indonesia. Penundaan ini berdampak kepada hilangnya momentum Indonesia untuk menuntaskan persoalan kolonialisme. Padahal situasi pada waktu itu merupakan momentum yang tepat melaksanakan dekolonisasi di Indonesia sampai tuntas. Banyak negara yang mendukung perjuangan Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari hasil Konferensi 19 negara Asia di New Delhi tanggal 23 Januari 1949. Konferensi ini antara lain memutuskan : 1). Pemimpin – pemimpin Republik Indonesia yang ditawan Belanda

---

<sup>5</sup> Pewarta Djakarta, Arti Irian Barat djika perang petjah, 16 Mei 1954

<sup>6</sup> Ide Anak Agung Gde Agung, *Twenty Years Indonesian Foreign Policy 1945-1965*, (Yogyakarta: Dutawacana University Press, 1990)

<sup>7</sup> Singodimedjo *op.cit.* hlm. 170

supaya dibebaskan, 2). Tentara Belanda harus ditarik mundur dari Yogyakarta.<sup>8</sup> Opini politik negara-negara Asia berpihak kepada Indonesia.

Konsekuensi penundaan ini Indonesia masih harus memikul beban sisa-sisa kolonialisme begitu lama. Sengketa Irian Barat berlarut-larut dari tahun 1949 sampai dengan 1969 dan menyedot energi bangsa Indonesia. Energi tersebut seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan nasional karena Indonesia sebagai negara baru merdeka memerlukan pembenahan dan pengembangan diri. Namun kenyataannya setiap kabinet di era Demokrasi Parlementer tahun 1950 - 1957 sibuk mengatur strategi dan menempatkan sengketa Irian Barat sebagai masalah prioritas. Setelah bekerja keras dan mendapat dukungan internasional, Indonesia dimasa Demokrasi Terpimpin tahun 1962 berhasil menyepakati Perjanjian New York. Perjanjian ini mengatur peralihan kekuasaan Belanda kepada Indonesia atas Irian Barat. Selanjutnya penyelesaian damai ini dituntaskan melalui Pepera di era Demokrasi Pancasila tahun 1969. Dengan demikian sengketa Irian Barat telah membebani tiga generasi politik di Indonesia yakni: Demokrasi Parlementer, Demokrasi Terpimpin, dan Demokrasi Pancasila.

Maka berdasarkan fakta-fakta diatas dipahami, KMB menjadi sumber masalah Irian Barat. KMB tidak mengatur secara rinci sengketa Irian Barat. Hal tersebut menyebabkan masalah ini sulit diselesaikan. KMB mendorong sengketa ini jadi berlarut-larut. Situasi ini lebih menguntungkan posisi Belanda dibandingkan posisi Indonesia.

Melalui KMB Belanda dan Indonesia mencoba bersikap kompromi. Delegasi Belanda mempertahankan *status quo* di Irian Barat, sedangkan delegasi Indonesia mencoba bersabar untuk menunggu setahun baru merundingkan soal Irian Barat. Ketika itu delegasi Indonesia dihadapkan situasi sulit, di satu sisi Indonesia

ingin memperoleh hasil maksimal dalam KMB, namun di sisi lain Indonesia harus mengakhiri KMB dengan sukses karena menyangkut pelimpahan kedaulatan nasional.

### **Kegagalan Perundingan Belanda-Indonesia**

Ayat e, pasal 2, Perjanjian KMB 1949 menyatakan kedudukan Irian Barat akan dirundingkan antara Kerajaan Belanda dan Republik Indonesia Serikat setahun setelah perundingan. Bagian Perjanjian KMB yang terkait dengan soal status Irian Barat dirancang oleh kedua delegasi bersifat umum agar tercapai kompromi. Jika pada waktu itu isi dokumen diatur dengan rinci, salah satu pihak yang merasa dirugikan dipastikan tidak mau menandatangani perundingan tersebut. Dokumen perjanjian yang bersifat umum ini bukannya menyelesaikan persoalan, tetapi justru menjadi sumber ketegangan antara Belanda dan Indonesia. Isi dokumen yang bersifat umum ini mengundang perbedaan interpretasi.

Dalam rangka melaksanakan kesepakatan KMB, di Jakarta awal tahun 1950 dan di Hague akhir tahun 1950 Belanda dan Indonesia melakukan perundingan, tetapi tidak menghasilkan sesuatu yang sungguh-sungguh berarti (signifikan) bagi penyelesaian sengketa Irian Barat. Maka asumsi yang mungkin dapat menjelaskannya, Belanda dan Indonesia memiliki perbedaan pandangan yang sangat mendasar dalam sengketa Irian Barat.

Pada bulan Maret tahun 1950 delegasi Belanda mengunjungi Indonesia. Ini sebagai realisasi perjanjian KMB. Isi perjanjian tersebut mengikat kedua negara untuk melaksanakan perundingan. Memang tujuan utama kehadiran delegasi Belanda ke Indonesia untuk berpartisipasi dalam Konferensi Menteri-menteri Uni Indonesia-Belanda, tetapi masalah sengketa Irian Barat juga menjadi isu yang penting dalam konferensi ini.<sup>9</sup> Bagi Indonesia

---

<sup>8</sup> Singodimedjo., *ibid*, hlm 170

---

<sup>9</sup> Anak Agung Gde Agung., *Op.cit* hlm. 80

justro isu status Irian Barat paling penting ketimbang isu lainnya.

Namun sikap Belanda dalam perundingan ini tidak mengarah kepada penyerahan Irian Barat. Belanda berpijak pada prinsip bahwa peralihan kedaulatan dari Kerajaan Belanda kepada RIS melalui KMB tidak termasuk wilayah Irian Barat. Dengan kata lain Belanda masih menguasai Irian Barat. Belanda sebagai negara bekas penjajah tidak mudah begitu saja menyerahkan wilayah yang dikuasainya kepada pihak lain. Apalagi seperti dikatakan diatas jika mengacu pada isi dokumen KMB, Belanda memang tidak wajib menyerahkan Irian Barat, tetapi hanya wajib merundingkannya dengan Indonesia. Artinya secara yuridis posisi Belanda lebih kuat dibandingkan Indonesia. Isi dokumen KMB menyatakan Irian Barat dalam keadaan *status quo* dan akan dirundingkan antara Belanda dan Indonesia setahun kemudian. Dokumen KMB tidak menjanjikan bahwa Belanda akan mengembalikan Irian Barat kepada Indonesia. Jadi status Irian Barat tergantung pada sikap Belanda dan Indonesia dalam meja perundingan. Dalam proses perundingan bisa terjadi beberapa skenario, *pertama* Irian Barat tetap dibawah kontrol Belanda, *kedua* Irian Barat dibagi dua antara Belanda dan Indonesia, *ketiga* Irian Barat bergabung dengan Indonesia.

Dengan demikian perundingan Belanda dan Indonesia di Jakarta pada Maret tahun 1950 tersebut disimpulkan tidak kondusif untuk penyelesaian sengketa Irian Barat. Belanda dalam perundingan ini bersikap konservatif, sedangkan Indonesia berisikap optimis. Indonesia berharap perundingan ini sebagai awal penyerahan Irian Barat oleh Belanda kepada Indonesia. Hasil perundingan ini ternyata mengecewakan delegasi dan masyarakat Indonesia. Dalam rangka menyelamatkan situasi, kedua negara membentuk komisi bersama. Komisi ini terdiri para pakar yang mewakili pemerintahnya dan bertugas membuat laporan bersama atas masalah tersebut. Namun komisi

ini juga tidak berhasil merumuskan laporan bersama dan akhirnya membuat laporan masing-masing kepada pemerintahnya. Walaupun demikian, Mohammad Hatta merasa optimis pada hasil perundingan bahwa Irian Barat akan diserahkan oleh Belanda kepada Indonesia pada akhir tahun 1950. Sikap optimis Hatta didasarkan pembicaraanya dengan Van Maarseveen, seorang Menteri Wilayah Seberang Lautan Belanda.<sup>10</sup>

Dalam rangka melanjutkan perundingan di Jakarta, pada bulan Desember tahun 1950 Belanda dan Indonesia menyelenggarakan konperensi khusus di Hague, Belanda. Pada konperensi khusus ini delegasi Indonesia dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Mohammad Rum, sedangkan delegasi dipimpin oleh Van Maarseveen. Kedua negara tetap menampakan perbedaan yang mendasar, Delegasi Indonesia mengajukan proposal yang isinya menggambarkan : pengakuan terhadap hak-hak ekonomi Belanda di Irian Barat, pemberian ijin kepada orang Belanda untuk menjadi pegawai administrasi, pemberian jaminan pensiun kepada pejabat Belanda, pemberian ijin imigrasi kepada orang Belanda ke Irian Barat, penggabungan sistem komunikasi di Irian Barat ke Indonesia dengan memperhatikan hak-hak kepemilikan pengusaha Belanda, pemberian jaminan kepada kebebasan beragama dan misionaris ke Irian Barat, pengupayaan tatanan demokrasi di Irian Barat. Dengan demikian, delegasi Indonesia mencoba menawarkan sejumlah konsesi kepada Belanda.

Gambaran isi proposal lengkapnya, sebagai berikut:

- 1) *Recognition of existing Dutch economic and financial rights and concessions plus special consideration in connection with new investments and concessions in the development and exploitation of soil and forest*

---

<sup>10</sup> Ide Anak Agung ., *Op,cit* hlm. 81.

- resources; preferential treatment for Dutch interests in such areas as trade, shipping, and industry;*
- 2) *Dutchmen to be eligible for administrative employment; Pensions for Dutch official to guaranteed by the Indonesian Government, as in the case of Round Table Conference Agreement*
  - 3) *Immigration of Dutch nationals to Irian to be permitted and due attention paid to supplying the manpower needs of West Irian;*
  - 4) *Incorporation of West Irian into Indonesian communication system but with due attention to the concessions granted earlier to Dutch or mixed enterprises;*
  - 5) *Guarantees for freedom of religion and assistance to the humanitarian work of religious mission by the Indonesian Government.;*
  - 6) *Efforts to be made to operate a fully democratic government in West Irian with a representative body to established as soon as possible with the population possessing full autonomy and a voice in the government*

Pihak Belanda merespon proposal delegasi Indonesia dengan proposal tandingan. Isi proposal delegasi Belanda dipandang cukup sinis. Isi proposal tersebut tidak mencerminkan respon positif terhadap tawaran konsesi Indonesia. Bahkan terkesan Belanda memprovokasi sikap Indonesia. Isi ringkasan proposal delegasi Belanda antara lain: kedaulatan Irian Barat dialihkan kepada RIS, tetapi *de facto* dan secara administrasi Irian Barat dibawah kontrol Belanda, perundingan dilanjutkan dengan dibantu PBB, sesuai dengan KMB Irian Barat sebelum ada keputusan melalui perundingan statusnya masih status quo.

Isi proposal delegasi Belanda selengkapya sebagai berikut:

- 1) *the sovereignty of West Irian should be transferred to the Netherlands-Indonesia Union, with the stipulation that the de facto control and administration over that territory would remain in Dutch hands;*
- 2) *the negotiations should be continued under the auspices of the still extant United Nations Commission for Indonesia or any other organ which could render any service to make that negotiation possible*
- 3) *Since the future of the area had not been decided by negotiation within the year's period stipulated in Article 2 of the Charter of the Transfer of Sovereignty, the Netherlands' sovereignty and the status quo should be maintained.*<sup>11</sup>

Kedua proposal diatas memiliki perbedaan yang mendasar. Proposal yang diajukan delegasi Indonesia sifatnya terlalu maju atau sangat progresif karena hanya bermuatan hal-hal yang bersifat teknis. Proposal ini tidak menyinggung sengketa kedaulatan atas Irian Barat, padahal masalah ini merupakan substansi dari perundingan Belanda dan Indonesia. Jadi, delegasi Indonesia memandang seolah-olah pelimpahan kekuasaan dari Belanda kepada Indonesia atas wilayah Irian Barat sudah selesai dilakukan. Dengan demikian, delegasi Indonesia juga terkesan tidak mengakui keberadaan Belanda di Irian Barat. Padahal kenyataannya Belanda secara *de facto* masih berkuasa di Irian Barat, sedangkan Indonesia baru pada tahap berjuang untuk mengambil alih Irian Barat. Jika orientasi muatan proposal tersebut merupakan strategi, strategi diplomasi yang demikian adalah jauh dari tujuan perundingan yang ingin membahas pelimpahan kekuasaan di Irian Barat. Jadi kesan yang diambil dari proposalnya bahwa delegasi

---

<sup>11</sup> Anak Agung Gede Agung. *Loc.cit* hlm. 88

Indonesia tidak bersikap realistis dengan kenyataan politik di Irian Barat yang masih diduduki oleh Belanda.

Sebaliknya proposal delegasi Belanda mencerminkan sikap negaranya yang tidak serius dalam merundingkan status Irian Barat. Bahkan sikap Belanda dipandang melecehkan bangsa Indonesia karena menawarkan suatu formula yang tidak masuk akal. Belanda menawarkan suatu formula pelimpahan kedaulatan Irian Barat dari Belanda kepada RIS, tetapi Irian Barat secara *de facto* dan secara administrasi masih dikuasai oleh Belanda. Pertanyaannya lalu dimana letak pelimpahan kedaulatannya? Delegasi Belanda memang langsung menyentuh substansi persoalan perundingan, namun negara ini menampilkan sikap yang sangat konservatif. Indikasi penyerahan Irian Barat kepada Indonesia sama sekali tidak nampak dalam proposal delegasi Belanda.

Namun kedua proposal kontroversi ini tetap dihargai keberadaannya. Isi kedua proposal tidak menuju kepada titik yang sama, tetapi sebaliknya mengarah kepada titik yang berlawanan. Dengan demikian, keduanya tidak bisa diharapkan segera memberi solusi kepada persoalan Irian Barat. Upaya perundingan yang dilakukan menjadi sia-sia. Proposal delegasi Indonesia dihargai karena cukup percaya diri menyampaikan sesuatu yang tidak lazim. Proposal ini tidak menyentuh substansi masalah yang dirundingkan. Sedangkan proposal delegasi Belanda juga patut hormati keberadaannya karena isinya masih membuka peluang perundingan dengan Indonesia—dengan melibatkan PBB. Walaupun sebagaimana orang berpandangan, tawaran Belanda tersebut hanya pernyataan formalitas atau dalam bahasa diplomasi sering disebut *lip service*. Ini biasanya disampaikan untuk memperoleh simpati dari masyarakat.

Kegagalan Konferensi Khusus tersebut memiliki dampak kepada Belanda. Kegagalan ini membuat Belanda tetap mengontrol Irian Barat. Perundingan kedua Belanda-Indonesia

tidak membuahkan apa-apa atau perundingan ini tetap menempatkan Irian Barat dalam posisi *status quo*. Sementara itu, kegagalan perundingan ini memperteguh sikap koservatisme di Belanda atas sengketa Irian Barat. Pemerintahan Belanda waktu itu adalah pemerintahan koalisi yang terdiri dari : Partai Katholik, Partai Koservatif, Partai Liberal, Partai Sosialis, dan Partai Buruh. Dalam peta politik ini, Partai Buruh dan Partai Katholik merupakan unsur terkuat. Partai Katholik menentang upaya pengembalian Irian Barat kepada Indonesia karena mengkhawatirkan keberadaan misi Katholik di wilayah ini,<sup>12</sup> sedangkan Partai Buruh hanya sekedar mendukung kebijakan Partai Katholik tersebut.

Kegagalan perundingan ini juga menimbulkan pengaruh bagi Indonesia. Kegagalan ini memenangkan opini politik yang bersikap non-kooperatif terhadap Belanda dalam penyelesaian sengketa Irian Barat. Sejak perundingan Belanda dan Indonesia di awal tahun 1950 kekuatan politik yang berhaluan kiri (sosialis) bersikap pesimis terhadap kelanjutan perundingan. Mereka tidak percaya pada pandangan Mohmammad Hatta bahwa Belanda akan mengembalikan Irian Barat melalui suatu perundingan di akhir tahun 1950. Hal ini ternyata terbukti dalam kenyataan sejarah diplomasi Belanda dan Indonesia dalam sengketa Irian Barat. Presiden Sukarno dalam pidato hari kemerdekaan 17 Agustus 1952 menyatakan bahwa Belanda sejak tahun 1950 telah menduduki wilayah Barat. Ini dipandang oleh Sukarno sebagai tantangan terhadap semangat proklamasi. Belanda hanya ditolerir menduduki Irian sampai tahun 1950 karena hal ini didasarkan kesepakatan KMB. Jika setelah sampai 1950 Belanda masih di sana, Indonesia berkewajiban memprotesnya. Kegagalan perundingan khusus soal Irian Barat telah menimbulkan kegelisahan di dalam negeri Indonesia.

---

<sup>12</sup> Anak Agung Ibid. hlm. 93

Maka berdasarkan fakta-fakta diatas bisa dikatakan, kegagalan perundingan - perundingan soal Irian Barat tidak terlepas dari perbedaan yang sangat mendasar antara delegasi Belanda dan Indonesia dalam memandang keberadaan Irian Barat.

## Penutup

Belanda berusaha melaksanakan politik *status quo* atas Irian Barat. Belanda memang memperoleh hak *status quo* atas Irian Barat selama setahun sejak KMB tahun 1949. Dalam hal ini, Belanda memanfaatkan sebaik mungkin waktu yang ada untuk kepentingannya dan setelah setahun Belanda masih mengulur-ngulur waktu pengembalian Irian Barat. Belanda merasa diuntungkan KMB karena Belanda memiliki waktu untuk mengatur strategi guna memperpanjang pendudukannya di Irian Barat. Belanda malah berusaha untuk tetap bertahan di Irian Barat dengan segala cara. Jadi, Belanda tidak terpanggil untuk melepaskan Irian Barat kepada Indonesia secara sukarela.

Indonesia berusaha memperjuangkan Irian Barat melalui jalur perundingan. Perundingan pertama Belanda dan Indonesia soal Irian Barat dilakukan di Jakarta Maret 1950. Perundingan ini gagal merumuskan kesepakatan soal Irian Barat. Selanjutnya perundingan kedua dilakukan melalui Konferensi Khusus di Hague, Belanda, bulan Desember 1950. Perundingan kali ini juga gagal mencapai kesepakatan. Dua kasus perundingan ini menjadi bukti ketidakseriusan Belanda untuk mengembalikan Irian Barat kepada Indonesia dan ketidakberdayaan Indonesia menghadapi Belanda dalam perjuangan mengembalikan Irian Barat.

Kekuasaan atau *power* bagi negara adalah sesuatu yang paling berharga. Kekuasaan politik yang sudah dicapai oleh suatu negara atas wilayah tertentu sulit dilepaskan begitu saja.

Apalagi negara tersebut sudah diuntungkan oleh kekuasaan tersebut. Jadi, pelepasan kekuasaan politik berarti melepaskan keuntungan-keuntungan yang selama ini dinikmati. Jika kekuasaan politik ini bersinggungan dengan negara lain, negara yang juga merasa berhak atas kekuasaan ini akan berusaha keras memperjuangkannya. Perjuangannya ini biasanya dimulai melalui jalur diplomasi atau perundingan, namun tidak tertutup kemungkinan melalui cara militer jika cara-cara diplomasi gagal.

Dengan demikian, fenomena politik dipandang sebagai perjuangan untuk memperoleh kekuasaan baik di lingkup nasional maupun internasional. Dalam hal ini, konflik antara pihak yang ingin mempertahankan kekuasaannya melawan pihak yang ingin meraih kekuasaan tersebut. Dalam upaya memenangkan konflik ini, faksi atau negara tersebut bisa bersikap curang atau menyimpang dari kaedah-kaedah yang ada.

## Daftar Pustaka

- Dua Puluh Lima Tahun Departemen Luar Negeri 1945-1970*, (Jakarta: Deparlu, 1970)
- Ide Anak Agung Gde Agung, *Twenty Years Indonesia Foreign Policy 1945-1965*, (Yogyakarta, Dutawacana University Press), 1990
- Modern Indonesian Project, (New York: Department of Far Eastern Studies, Cornell University, 1958)
- Panitian 75 Tahun Kasman, *Hidup Adalah Perjuangan : Kasman Singodimedjo 75 tahun*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1982)
- Pewartu Djakarta, "Arti Irian Barat djika perang petjah," 16 Mei 1954
- Robert C. Bone, Jr. *The Dynamic of the Western New Guinea (Irian Barat) Problem*, (New York: Cornell University, 1962)